

II.A.E.5

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN

No: /UPPM-STP/IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Daging, A.Pi., MM.
NIP : 196608031992031012
Jabatan : Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dadan Zulkifli, S.Ag., MM
NIP : 196803141999031003
Jabatan : Lektor Kepala

Telah melaksanakan kegiatan Peneliiian dan Pengembangan Ilmu dengan menulis artikel pada media cetak harian SWARA PENDIDIKAN Depok pada 18 Juli 2016

Jakarta, 01 September 2016
Kepala UPPM



I Ketut Daging, A.Pi, MT
NIP. 19660803 199203 1 012



Kumah Belajar
belajar untuk semua
Para pengajar maupun pelajar kini dapat belajar
mengajar melalui sambungan internet secara gratis.
KLIK DISINI

- Home
- Berita Terkini
- Nasional Home / Edukasi / Konsep Pengembangan Masyarakat Nelayan



Segenap Pimpinan, Karyawan & Wartawan
SWara Pendidikan Online & Cetak
Mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Konsep Pengembangan Masyarakat Nelayan

telah dibaca sebanyak : 57



Dadan Zulkifli, MM (Dosen Sekolah Tinggi Perikanan)

A. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Ada dua premis mayor yang kita bisa dijadikan dasar sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yaitu kegagalan dan harapan (Friedman: 1992). Kegagalan dapat dimengerti sebagai gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam mengatasi problema kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun harapan muncul karena tersedianya banyak alternatif seperti munculnya suasana demokratisasi, persamaan hak perempuan dan pria, kesempatan yang sama untuk setiap generasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Kegagalan dan harapan merupakan cerminan dari nilai-nilai normatif dan moral. Keduanya akan sangat terasa pada tingkat individu dan kolektif. Sehingga pemberdayaan masyarakat secara esensi adalah nilai kolektif pemberdayaan individual. (Friedman: 1992)

Masyarakat nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/ binatang air/ tanaman. Jadi nelayan dapat dimengerti sebagai kelompok kerja yang tempat kerjanya dia air (Supriadi:2016). Sedangkan UU No.45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa definisi nelayan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Mulyadi (2005) membedakan kelompok nelayan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan.

B. Memberdayakan Masyarakat Nelayan

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki program-program yang dilaksanakan sehingga tidak aneh banyak program hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat nelayan. Memberdayakan masyarakat nelayan berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat nelayan tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena disana terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

1. Masyarakat nelayan tangkap.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul.
3. Masyarakat nelayan buruh.
4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

C. Konsep Alternatif Pembangunan Masyarakat Nelayan

Pembangunan masyarakat nelayan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi yang harus memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berbasis kelembagaan. Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau *Resource Base Strategy (RBS)*, yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar.

Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumber daya lokal/pesisir dan kelautan yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (*management by process*) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (*knowledge based management*).

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan haruslah dirancang dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. ***

Penulis : Dadan Zulkifli, MM (Dosen Sekolah Tinggi Perikanan)